

APIP dalam Pelaksanaan Maturitas SPIP

Nasrullah Djamil

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru

*Email : nasrullah.djamil@uin-suska.ac.id

ARTICLE INFO :

Keywords :

Role of SPIP;
SPIP;
Leadership;
Internal Supervisor;
Consultant;
Quality Assurance;
Catalyst

Article History :

Received :2023-02-04
Revised : 2023-04-28
Accepted :2023-06-28
Online :2023-06-30

ABSTRACT

One of the problems that still occur in Indonesia today is the weakness of the Government Internal Control System (SPIP). This is indicated by the many findings of BPK's examination of weaknesses in the government's internal control system. In this case, there is a role for government internal auditors that are highly expected to create an effective and sustainable control system. This study aims to determine the effect of the role of APIP in implementing the Maturity of the SPIP at the Inspectorate Kab. South Solok. This research is a quantitative. The population and sample in this research were all government internal supervisory apparatus at the Inspectorate Kab. South Solok. Data collection technique used is through a questionnaire. The analysis technique used in this research is descriptive statistical analysis. The instrument were tested using validity test, reliability test, and normality test. Data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the role of leadership, internal supervisors, consultants, and catalysts had a positive effect on the implementation of the maturity of SPIP. While the role of quality assurance has a negative effect on the implementation of the maturity of SPIP.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1). Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (Cost and benefit), rasa keadilan dan kepatutan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Penelitian Sardi (2016), memberikan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Kenyataannya, Sistem Pengendalian Intern di Indonesia rata-rata masih berada pada level berkembang sehingga belum dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Keberhasilan atas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah tidak lepas dari peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang menjadi unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (www.kemenkeu.go.id). Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan



bersih serta berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, peran fungsional APIP pun diperluas dengan diterbitkannya Peraturan MENPAN No.5 Tahun 2008, Peraturan MENPAN-RB No.19 Tahun 2009, dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia, tentang perluasan tugas dan wewenang dari APIP yang semula sebagai auditor internal pemerintah diperluas menjadi konsultan manajemen untuk mengefisienkan penyelenggaraan pemerintah dan aparat pencegah serta pemberantasan korupsi di internal pemerintah (Novriansa dan Riyanto, 2016). Salah satu jenis pengawasan pemerintah daerah adalah pengawasan internal. Pengawasan internal ini dijalankan oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah (Trisnawati, 2018). Peran utama APIP adalah sebagai konsultan dan problem solver bagi pemerintah daerah dengan tugas melakukan pemeriksaan, review, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah (Matei dkk., 2017:90).

Pengawasan pemerintah daerah bermaksud untuk memastikan bahwa seluruh institusi yang melaksanakan fungsi publik benar-benar menjalankan kegiatannya secara efisien dan efektif. Kenyataannya, pengawasan internal masih menghadapi kendala di berbagai pemerintah daerah di Indonesia. Aparat pengawasan belum cukup berintegritas dan memiliki kapabilitas, aparat pengawasan belum benar-benar independen, dan kebutuhan jumlah personel aparat pengawasan belum terpenuhi (Anonim, 2016a:1).

Permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan pemerintah di Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus kecurangan seperti korupsi. Banyak pihak yang berpendapat salah satu penyebab terjadinya permasalahan tersebut adalah kelemahan sistem pengendalian intern. Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara juga menyampaikan “permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan” (gemamedianet.com). Kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, pemeriksa harus melakukan pengembangan prosedur audit dan mengungkapkannya dalam LHP. Tindakan pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian (BPKP, 2013). Selain itu, Ketua Umum Badan Pengurus Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNA RI), Drs TB Rahmad Sukendar, menganggap, salah satu penyebab maraknya kecurangan keuangan daerah adalah lemahnya Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat. Intinya, kata dia, Inspektorat adalah Instansi Daerah yang menyebar pemerintahan Daerah (Pemda) dan Desa, sekaligus mencegah pemulihan sejak dini. “Inspektorat Daerah selama ini, dan sengaja tidak memperkuat pengawasan dan praktik terhadap korupsi di daerah. Ini mendorong maraknya kasus korupsi keuangan daerah dan bergulir Dana Desa oleh Oknum Kades,” kata Rahmad (kulitinta.id).

Fenomena mengenai masih lemahnya pengawasan inspektorat, terjadi di Aceh Tenggara yaitu salah satu anggota DPRK Aceh Tenggara menilai auditor Inspektorat masih lemah dalam mengawasi penggunaan anggaran, mulai dari pemkab, kecamatan sampai pedesaan. Bahkan, dana desa yang mencapai ratusan juta rupiah diduga diselewengkan atau juga hanya melibatkan beberapa orang yang dekat dengan kepala desa, kepala inspektur Aceh Tenggara, Sanudin kemarin mengaku tim auditor terbatas, hanya berjumlah 18 orang, yang seharusnya 48 orang atau lebih. Masyarakat meminta bupati untuk menambah tenaga auditor, bahkan dapat memanfaatkan tenaga kontrak yang memiliki kemampuan dalam bidang auditor, para auditor harus bekerja profesional, karena jika tidak akan berdampak runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan internal (aceh.tribunnews.com). Berdasarkan fenomena tersebut, pada kasus Inspektorat Kota Aceh, dalam pengawasan peran auditor internal mengelola aktivitas audit internal tidak terpenuhi, karena Sumber daya audit internal tidak sesuai, tidak memadai dan tidak dapat digunakan secara efektif. Selain itu terkait kelemahan sistem pengendalian, BPK mengungkapkan 9.808 temuan yang memuat 15.773 permasalahan meliputi 7.539 permasalahan kelemahan sistem pengendalian internal dan 8.030 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp10,06 triliun (kompas.com).

Kabupaten Solok Selatan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas audit laporan keuangan Pemerintah Daerah. Namun BPK masih menemukan permasalahan (temuan) audit baik itu audit atas laporan keuangan, audit sistem pengendalian internal dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil pemeriksaan BPK Tahun 2017 pada pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan menunjukkan bahwa penerapan SPIP pada Pemda Solok Selatan belum diterapkan secara maksimal. Terdapat temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

1. Pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tidak sesuai petunjuk pelaksanaan.
2. Kesalahan penganggaran Belanja Modal pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pertanahan
3. Penatausahaan dan Pemakaian Aset Tetap belum sesuai dengan
4. Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Daerah (padang.bpk.go.id).



Dari temuan kelemahan sistem pengendalian internal oleh BPK di atas, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di Kab. Solok Selatan masih lemah atau belum maksimal. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan SPIP, dilakukan penilaian maturitas (kematangan) implementasi SPIP. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Pengukuran tingkat maturitas SPIP menunjukkan kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Satuan ukur dari pengukuran maturitas sistem pengendalian intern adalah level maturitas. Level tersebut ditentukan dengan membuat skala dari level 0 sampai level 5. Selain sebagai alat ukur, pelevelan ini nantinya dapat menjadi sarana organisasi merancang rencana tindak (action plan) untuk melakukan perbaikan berkelanjutan menuju level yang lebih tinggi.

Mulai tahun 2016 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disibukkan lagi dengan pekerjaan baru yaitu menilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada instansinya masing-masing. Rupanya kesibukan ini muncul dipicu oleh target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Indikator kinerja berupa "tingkat kematangan implementasi SPIP" ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019 (RPJMN 2015-2019 Buku II). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP telah menyiapkan pedomannya. Pedoman ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (klikharso.com).

Dalam pelaksanaan SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat melakukan penilaian Maturitas di Kabupaten Solok Selatan yang menunjukkan Solok Selatan berada pada level 2 (berkembang) (inspektorat.sumbarprov.go.id). Artinya Kabupaten Solok Selatan harus melakukan upaya lebih keras lagi untuk meningkat dari level 2 (berkembang) ke level 3 (terdefinisi). Dalam hal ini peran inspektorat sangat dibutuhkan, karena inspektoratlah yang memiliki tugas dan fungsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan maturitas SPIP.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Angel (2017) dimana peran Inspektorat dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meliputi

1. kepemimpinan, dimana inspektorat sebagai pembina pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten,
2. pengawasan intern, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi Pengawasan Intern yang mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan penjamin kualitas yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta bersih dari praktek KKN,
3. konsultan (consultant), Inspektorat Kabupaten membuka ruang yang selebar-lebarnya kepada semua SKPD yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan masalah-masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, baik di tingkat SKPD sampai tingkat desa, khususnya lagi konsultasi pertanggungjawaban dana desa,
4. penjamin mutu (quality assurance), dalam setiap pelaksanaan audit diharapkan mampu mengidentifikasi risiko dan mendorong proses perbaikan yang berkelanjutan, mendorong APIP Inspektorat Kabupaten untuk melaksanakan salah satu perannya sebagai penjamin mutu. Kemudian penambahan variabel katalisator dari penelitian Arfiani dkk. (2020), yang menyatakan fungsi Inspektorat sebagai katalisator, Inspektorat akan ikut berperan mulai dari penentuan tujuan yang hendak dicapai sampai dengan menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut.

Beberapa penelitian tentang penerapan SPI sudah pernah dilakukan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Zumriyatun Laila (2010) pada dua Pemda di Sumatera Barat, menemukan bahwa penerapan SPIP di Kabupaten Tanah Datar maupun Kabupaten Pasaman berada pada level sedang karena masih banyak ditemukan kelemahan-kelemahan SPIP. Widya Pratiwi (2012) menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kabupaten Bungo berada pada level cukup. Dalam penelitian Fitrianty (2017), belum tercapainya target level 3 (tiga) maturitas SPIP di Kabupaten Gorontalo mengindikasikan bahwa penerapan SPIP masih mengalami banyak kendala. Kendala-kendala dalam penerapan SPIP yaitu kompetensi SDM belum memadai, kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi, terbatasnya anggaran, kurangnya kepatuhan, belum maksimalnya kegiatan evaluasi dan dokumentasi, dan terdapat kegiatan yang belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam penerapan SPIP yaitu: 1) program pengembangan SDM melalui diklat substantif dan pelatihan kantor



sendiri, 2) memaksimalkan anggaran, 3) membangun komunikasi yang efektif, 4) menambah jumlah auditor dan 5) membangun komitmen organisasi.

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern (APIP) dalam Pelaksanaan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Studi Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan)”.

KAJIAN LITERATUR

A. Teori Agensi

Dalam hubungan ini terjadi perbedaan kepentingan antara agent dan principal dan adanya perbedaan informasi yang dimiliki serta tujuan dan pilihan risiko terkait usaha yang dilakukan antara agent dengan principal sehingga dapat menimbulkan konflik diantara keduanya (Aikins, 2012). Konflik akan terus meningkat karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas agent sehari-hari untuk memastikan bahwa agent telah bekerja sesuai dengan keinginan dari principal sehingga berdampak pada timbulnya asimetri informasi (Latifah, 2010).

Masyarakat sebagai principal memiliki hak menilai dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan yang baik bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut sebagai agent dan diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat agar mampu memenuhi harapan masyarakat. Dua sisi yang berbeda ini seringkali menimbulkan konflik. Apalagi masyarakat kebanyakan tidak puas dengan hasil kinerja pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian untuk mengatur perbedaan dua kepentingan tersebut yang sangat menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Teori keagenan yang kita ketahui bersama menempatkan auditor, dalam pengertian luas, pada tempat yang strategis. Auditor ada untuk memberikan jaminan terhadap pencapaian tujuan prinsipal yang ditiptkan pada agen akan terlaksana dengan baik. Keputusan-keputusan prinsipal, akan diwarnai dengan sangat tebal oleh saran-saran dari auditor. Tingkat kepercayaan prinsipal kepada agen, ditentukan oleh sejauh mana auditor dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Untuk mendapatkan saran yang paling tinggi derajatnya, dalam hal ini prinsipal membutuhkan entitas yang merdeka, atau independen dari segala kepentingan. Independensi tersebut dipercaya akan mengarahkan kepada obyektivitas saran auditor yang akan menambah nilai suatu organisasi (Bayhi, 2012).

Auditor berperan sebagai penengah kedua belah pihak (agent dan principal) yang berbeda kepentingan dalam mengelola keuangan perusahaan. Tugas dari auditor diantaranya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Dengan diaudit oleh auditor yang independen, agent dapat membuktikan bahwa kepercayaan principal tidak diselewengkan untuk kepentingan pribadi agent (Saputri, 2018). Penerapan good governance oleh pemerintah dan memaksimalkan efektivitas peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah menjadi mekanisme yang penting untuk pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja pemerintah yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat (principal).

B. Peran Pengawasan Internal (watchdog) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP mengawasi setiap instansi pemerintah daerah apakah kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik atau belum. Melalui pengawasan yang baik APIP dapat menilai pelaksanaan SPIP pada setiap instansi. Dengan pengawasan terhadap pelaksanaan SPIP, dapat mengurangi tindakan menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Jika APIP telah melaksanakan peran pengawasannya dengan baik akan berdampak pada pemerintahan yang bersih dari tindakan menyimpang. Sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat (principal) kepada instansi pemerintah (principal) bahwa pengelolaan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

C. Peran Konsultan (consultant) terhadap pelaksanaan Maturitas SPIP

APIP sebagai konsultan diharapkan mampu memberikan manfaat berupa saran untuk perbaikan dan ikut berpartisipasi membantu instansi melakukan berbagai tindakan perbaikan tersebut. Dengan saran perbaikan yang diberikan oleh APIP dapat mendukung adanya pelaksanaan SPIP yang baik pada setiap OPD. Sehingga sebagai konsultan, APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (principal) bahwa setiap OPD (agent) telah menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



D. Peran Penjamin Mutu (quality Assurance) terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Inspektorat sebagai penjamin mutu yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pelaksanaan SPIP, APIP menjamin bahwa setiap OPD telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan SPIP. Dengan demikian, sebagai penjamin mutu APIP dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat (principle) bahwa setiap OPD (agent) telah menjalankan tugasnya dengan baik.

E. Peran Katalisator terhadap Pelaksanaan Maturitas SPIP

Sebagai katalisator APIP melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang mendorong kearah yang lebih baik, sehingga akan membantu efektivitas pelaksanaan SPIP organisasi tersebut. Dengan pelaksanaan SPIP yang efektif akan mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Sehingga APIP dalam meyakinkan principle bahwa setiap OPD telah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tidak mengutamakan kepentingan pribadinya.

F. Teori Peran

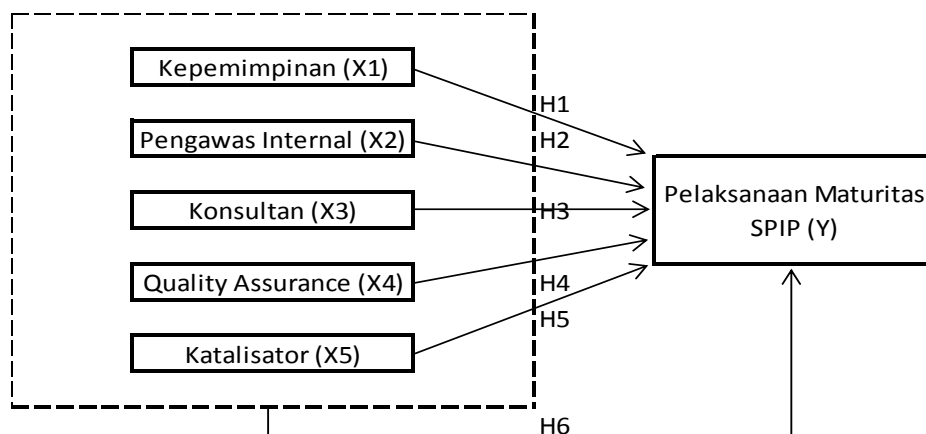
Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 2015).

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”(Mukmin, 2014).

Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, memainkan peranan yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran dan fungsi Inspektorat antara lain sebagai mitra kerja pemerintah daerah untuk memudahkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien (Angel, 2017).

G. Kerangka Konseptual

Gambar 1.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Kumpulan Peneitian (2020)

METODE

Menurut metodenya, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian survei (*survey research*) yang berupa penelitian penjelasan dan pengujian hipotesa (*explanatory*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pengawas internal pada kantor Inspektorat Kabupaten Solok Selatan yang berjumlah 30 orang, teknik pengambilan sampel menggunakan sensus, yaitu seluruh populasi dijadikan sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kepemimpinan (X1), Pengawas Internal (X2), Konsultan (X3), Quality Assurance (X4), Katalisator (X5) dan Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y).

Untuk pengujian dalam penelitian ini, digunakan :

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2018).

2. Uji Kualitas Data (Instrumen)

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban responden konsisten bila diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian, maka di perlukan uji reliabilitas dan validitas.

a. Uji validitas (Test of Validity)

Uji validitas dilakukan terhadap item-item yang telah disusun berdasarkan konsep operasionalisasi variabel beserta indikator-indikatornya. Suatu item dianggap shahih jika item tersebut mampu mengungkapkan apa yang diungkapkan atau apa yang ingin diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan Item-Total Statistic. Menilai kevalidan masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat dari nilai Corrected item-Total Correlation masing-masing butir pernyataan.

Pernyataan dikatakan valid jika Corrected item-Total Correlation memiliki nilai kritis $>$ dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item yang memiliki korelasi $>$ 30% dikategorikan valid, sedangkan item yang memiliki korelasi $<$ 30% dikategorikan tidak valid dan akan disisihkan dari analisis selanjutnya (Ghozali, 2018).

b. Uji Keandalan/Reliabilitas (Test of Reliability)

Kriteria yang digunakan dalam uji ini adalah One Shot, artinya satu kali pengukuran saja dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau, mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pada SPSS reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk dikatakan handal atau reliabel jika memberikan nilai $\alpha >$ 0,60 (Ghozali, 2018).

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Ghozali (2018) menjelaskan bahwa uji normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, kriteria yang digunakan adalah jika masing-masing variabel menghasilkan nilai K-S-Z dengan $P >$ 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas. Menganalisis korelasi antar variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi, dimana nilai VIF $>$ 10 maka dapat diketahui bahwa ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi. Jika nilai VIF $<$ 10 maka dapat diketahui bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018).

c. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda yang diuji terjadi ketidaksamaan varians dari residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya. Metode untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji glejser. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau dapat dikatakan sebagai homokedastisitas. Penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji

glejser. Dalam uji glejser jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan serta kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS (Statistical Package for Social Science) yang meliputi analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menggunakan signifikansi pengaruh Kepemimpinan (X1), Pengawas Internal (X2), Konsultan (X3), Quality Assurance (X4), Katalisator (X5) dan Pelaksanaan Maturitas SPIP (Y). Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

Dimana :

Y	= Pelaksanaan Maturitas SPIP
X1	= Kepemimpinan
X2	= Pengawas Internal
X3	= Konsultan
X4	= Quality Assurance
X5	= Katalisator
e	= Error
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi

a. Uji F

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikan < 0,05, maka hipotesis diterima dan berarti model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05, maka hipotesis ditolak dan berarti model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2018).

b. Uji Statistik t

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerapkan variasi-variasi dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari tingkat signidikan (α). Tingkat signifikan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah $\alpha = 5\%$. Hal ini berarti apabila nilai p value (sig) lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara individu dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji goodness of fit dari model regresi. Besarnya nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square (R²), apabila suatu variabel independen ditambahkan kedalam model sehingga tidak menimbulkan bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2018).



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1.1
Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation		Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
PELAKSANAAN MATURITAS	30	28	67	95	77,07317	1,176181	7,531236	56,71951
KEPEMIMPINAN	30	54	139	193	150,0976	2,065041	13,22272	174,8402
PENGAWAS INTERNAL	30	43	36	79	68,90244	1,55069	9,929262	98,59024
KONSULTAN	30	75	121	189	120,0375	2,650674	11,71696	141,4024
QA	30	56	145	176	60,02439	3,06902	8,29262	84,90244
KATALISATOR	30	61	111	123	40,90244	1,901996	3,001903	4,390244
Valid N (listwise)	30							

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari output diatas, menunjukkan jumlah responden (N) adalah 30 orang. Dari 30 orang ini pelaksanaan maturitas SPIP terkecil (minimum) adalah 67,00 dan pelaksanaan maturitas SPIP tertinggi (maksimal) adalah 95,00 dengan nilai rata-rata motivasi belajar adalah 77,07 dengan standar deviasi 7,53. Kemudian kepemimpinan terkecil (minimum) adalah 139,00 dan kepemimpinan tertinggi (maksimal) adalah 193,00 dengan nilai rata-rata adalah 150,10 dengan standar deviasi 13,22. Kemudian pengawas internal terkecil (minimum) adalah 36,00 dan pengawas internal (maksimal) adalah 79,00 dengan nilai rata-rata adalah 68,90 dengan standar deviasi 9,93. Kemudian konsultan terkecil (minimum) adalah 121,00 dan konsultan tertinggi (maksimal) adalah 189,00 dengan nilai rata-rata adalah 120,04 dengan standar deviasi 11,72. Kemudian quality assurance terkecil (minimum) adalah 145,00 dan quality assurance tertinggi (maksimal) adalah 176,00 dengan nilai rata-rata adalah 11,72 dengan standar deviasi 8,30. Kemudian katalisator terkecil (minimum) adalah 111,00 dan katalisator tertinggi (maksimal) adalah 1236,00 dengan nilai rata-rata adalah 40,90 dengan standar deviasi 3,00.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Dari output penelitian dapat dilihat bahwa nilai Corrected item-Total Correlation seluruh butir variabel Kepemimpinan, Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator memiliki nilai kritis > dari 0,3 atau 30%. Dengan demikian maka item butir untuk seluruh variabel penelitian dikategorikan valid dan layak digunakan untuk pengujian selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Tabel 1.2
Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized	Kriteria	Keterangan
PM SPIP	0,740	0,60	Reliabel
KPM	0,826	0,60	Reliabel
PI	0,844	0,60	Reliabel
KON	0,950	0,60	Reliabel
QA	0,660	0,60	Reliabel
KTL	0,710	0,60	Reliabel

Sumber : Data olahan, 2020



Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha (α) seluruh variabel penelitian nilai $\alpha > 0,60$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel handal dan dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Dilihat dari output penelitian nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov seluruh variabel penelitian diatas 0,05. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi secara normal dan layak untuk digunakan untuk pengolahan data selanjutnya.

b Uji Multikolinieritas

Dilihat dari nilai tolerance pada output, terlihat bahwa tidak ada nilai tolerance dari masing-masing variabel yang kurang dari 0,10, dan tidak nilai VIF yang lebih dari 10. Maka ini dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian tidak terkena multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heterokedastisitas

Dilihat dari nilai signifikansi pada output penelitian, terlihat bahwa nilai signifikansi seluruh variabel penelitian diatas 5 %. Maka ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terkena heterokedastisitas.

4. Uji Hipotesis (Regresi Berganda)

a. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 1.3
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,888 ^a	,879	,877	3,55948

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN, PENGAWAS INTERNAL, KONSULTAN, QUALITY ASSURANCE, KATALISATOR

b. Dependent Variable: PELAKSANAAN MATURITAS SPIP

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari data tabel 1.3 diatas, terlihat besaran nilai dari adjusted R² adalah 0,877, hal ini berarti variabel motivasi belajar dapat dijelaskan dan dipengaruhi oleh kedua variabel independen sebesar 87,7%. Sedangkan sisanya (100% - 87,7% = 12,3%) dipengaruhi oleh variabel lainnya.

b. Uji F

Tabel 1.4
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1787,325	2	893,663	70,534	,000 ^a
Residual	481,455	38	12,670		
Total	2268,780	40			

a. Predictors: (Constant), KEPEMIMPINAN, PENGAWAS INTERNAL, KONSULTAN, QUALITY ASSURANCE, KATALISATOR

b. Dependent Variable: PELAKSANAAN MATURITAS SPIP

Sumber : Data Olahan, 2020



Dari data tabel 1.4 diatas, terlihat besaran nilai F hitung sebesar 70,534 dengan probabilitas sebesar 0,00. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan, Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator secara bersama-sama mempengaruhi Pelaksanaan Maturitas SPIP.

c. Uji t

Tabel 1.5
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	29,98	34,73		0,86	0,00
KEPEMIMPINAN	0,39	0,14	0,81	2,67	0,01
PENGAWAS INTERNAL	0,89	0,18	0,68	1,73	0,00
KONSULTAN	0,73	0,12	0,61	2,47	0,00
QUALITY ASSURANCE	0,51	0,16	0,66	0,43	0,02
KATALISATOR	0,16	0,19	0,21	0,84	0,00

Sumber : Data Olahan, 2020

Dari data tabel 1.5 diatas, terlihat besaran nilai signifikansi seluruh variabel independen dibawah 0,05. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian diterima, dimana variabel Kepemimpinan, Pengawasa Internal, Konsultan, QA, Katalisator mempengaruhi Pelaksanaan Maturitas SPIP di Kabupaten Solok Selatan, dengan persamaan matematis sebagai berikut :

$$\text{Pelaksanaan Maturitas SPIP} = 29,978 + 0,389 \text{ KPM} + 0,89 \text{ PI} + 0,73 \text{ KON} + 0,51 \text{ QA} + 0,16 \text{ KTL}$$

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Teori Kepemimpinan Situasional, teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang efektif tergantung pada situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Dalam konteks pelaksanaan maturitas SPIP, kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi SPIP dapat meningkatkan keberhasilannya. Pemimpin perlu memiliki keterampilan dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi pegawai untuk menjalankan SPIP dengan baik. Teori ini menekankan pentingnya pengawasan internal dalam mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan standar organisasi. Pengawasan internal yang efektif dapat mempengaruhi perilaku pegawai dalam melaksanakan SPIP dengan baik. Teori ini juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara pengawas dan pegawai, pemisahan tugas yang jelas, serta penerapan kontrol yang tepat. Konsultan yang kompeten dan berpengalaman dapat memberikan pengetahuan, wawasan, dan bimbingan yang diperlukan dalam pelaksanaan maturitas SPIP. Konsultan dapat membantu organisasi dalam merancang, mengimplementasikan, dan memantau sistem pengendalian internal yang efektif. Teori ini juga menyoroti pentingnya kerjasama dan komunikasi yang baik antara konsultan dan organisasi. Pentingnya jaminan kualitas dalam meningkatkan pelaksanaan maturitas SPIP. Dengan adanya mekanisme quality assurance yang kuat, organisasi dapat melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa SPIP berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Teori ini juga menyoroti pentingnya peningkatan terus-menerus dan pembelajaran organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan SPIP. Katalisator dengan pelaksanaan maturitas SPIP, konsep ini dapat terkait dengan teori perubahan organisasi. Teori perubahan organisasi menekankan pentingnya faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Dalam konteks pelaksanaan maturitas SPIP, katalisator seperti dukungan manajemen senior, kebijakan organisasi yang mendukung, dan sumber daya yang memadai dapat mempengaruhi adopsi dan pelaksanaan SPIP yang lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2013). Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Asosiasi Audit Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI).
- Aikins, K. S. 2012. Determinants of Auditee Adoption of Audit Recommendations: Local Government Auditors Perspective. *Journal of Budgeting, Accounting, and Financial Management*. pp: 195-220.
- Angel M., Grace B. Nangoi, dan Jenny Morasa, 2017, Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, *Jurnal Riset Ak dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, hal 20-29.
- Anonim.2016b. "Disfungsi Pengawasan Internal Kppod" <https://www.kppod.org/berita/view?id=389>. Diakses 5 Oktober Pukul 19.10
- Arfiani, Wa Ode, Masdar Mas'ud, dan Suriyanti. 2020. Efektivitas Fungsi Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Di Kabupaten Pulau Taliabu. *PARADOKS: JURNAL ILMU EKONOMI* Volume 3. No.1. Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
- Bagus, Ida Dwika Maliawan, dkk. 2017. Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Empiris pada Bank Mandiri Kantor Cabang Area Denpasar). *Jurnal Akuntansi*, Vol. 8, No. 2.
- Bastian, Indra. 2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bayhi, Jonathan. 2012. *Internal Auditing and Its Stakeholders: Understanding Perceptions, Achieving Potential*. The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Dharmawan, Taufan dan Nono Supriatna. 2016. Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4 No. 1 hal 941-948
- Elieser Y., Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan. *E-Journal Administrative Reform*, Vol. 4 No. 1, Hal 65 –78.
- Fahmi, Irham. 2012. *Manajemen Kepemimpinan, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Albeta, Bandung.
- Fatresia, Cindy. 2017. *Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal (Studi Kasus pada PT. Mitra Karya Plastindo)*. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- GemaMedianet. "BPK RI Serahkan LHP LKPD 2018 Dalam Paripurna DPRD Sumbar, Moermahadi: Kewajaran Bukan Jaminan Terbebas dari "Fraud" <http://www.gemamedianet.com/2019/04/bpk-ri-serahkan-lhp-lkpd-2018-dalam.html>. Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.20.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19* (edisi kelima). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi 7. Semarang: Universitas Diponegoro
- Sumbarprov. 2018 . Penguatan SPI dalam rangka peningkatan kualitas LKPD APIP dan Dana Desa Sis keudes https://inspektorat.sumbarprov.go.id/images/2018/02/file/Penguatan_SPI_P_dlm_rangka_peningkatan_Kualitas_LKPD,APIP_dan_DD_Siskeudes.pdf. Di akses pada 21 November 2019, pukul 20.15
- Padang. Bpk. go. id. <https://padang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Pidato-Kalan-Penyerahan-LHP-LKPD-2017-Sesi-21.pdf>. Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.10
- Junedah, Lastri. 2019. Pengaruh Maturitas SPIP, Kapabilitas APIP, Serta Implementasi E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Tesis. Lampung: Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Kadarusman, D. 2012. *Natural Intelligence Leadership: Cara Pandang Baru Terhadap Kecerdasa dan Karakter Kepemimpinan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Kriyantono, Rachmad. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang : Kencana Media Group.
- Kulitinta. 2018. Lemahnya pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa rawan korupsi. <https://www.kulitinta.id/2018/08/01/lemahnya-pengawasan-inspektorat-penggunaan-dana-desa-rawan-korupsi/>. Diakses pada 12 Oktober 22.45 WIB



- Laila, Zumriyatun. 2010. Analisis Penyelenggaraan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dua Pemda di Sumatera Barat. Tesis. Padang: Universitas Andalas.
- Latifah, N.P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?. Fokus Ekonomi Vol. 5 No.2 Desember 2010: 85 - 94.
- Lubis, Ibrahim, 2015. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahesthi, Maruti Giri dan Muhammad Dahlan, 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan, volume 13 Nomor 2.
- Mailoor, Jefri H, Jullie J. S, dan Hendrik G. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Good Governance (Studi Empiris di Kab. Kepulauan Talaud). Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill". Vol. 8, Nomor. 2.
- Marlaini, Aliamin, dan Mirna Indriani. 2018. Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat Di Aceh). Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol. 4, No. 1.
- Masdan, Susan Rabbany, Ventje Ilat, Winston Pontoh. Analisis Kendala-kendala Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Tesis. Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi.
- Matei, A.M., Herman Karamoy, Linda Lambey, 2017. Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, Vol. 8, No. 1, 86-96.
- Maya, Sari. 2015. Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. Jurnal Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SINEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Meilani, A & Y., Widiastuti (2015) Employee UPBJJ-UT Perceptions of The Role Auditor Internal Audit. Conference in Business, Accounting, and Management. 2(1), 34-45
- Mukmin, Hasan. Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 62
- Nanang, Fattah. 2013. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nawa Budi Prakoso. 2015. Analisis Determinan Efektivitas Audit Internal Pada Sektor Pemerintahan. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Ningsih, Yuni dan Kiswanto. 2019. Prinsip Perilaku APIP, Kualitas Audit dan Komitmen Profesional sebagai moderating (Studi Empiris di BPKP Perwakilan Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Pajak. Vol. 7 No. 1
- Novriansa, Agil dan Bambang Riyanto. 2016. Role Conflict and Role Ambiguity on Local Government Internal Auditors: The Determinant and Impacts. Journal of Indonesian Economy and Business. Vol.31 (1), pp: 63-82.
- Nugraheni, Brifana Satriawati dan Indah Mustikawati. 2016. Peran Audit Internal sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang keefektifan pengendalian internal pemberian kredit pada PT. BRI (Persero) TBK. Kantor Cabang Wates. Jurnal Profita Edisi 5.
- Nurfa, Muhammad Fajrin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peran Inspektorat Daerah sebagai Konsultan dan Katalis (Studi kasus pada Pemprov. Sulawesi Selatan). Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin).
- Paneo, Fitrianty, Jullie J. Sondakh, dan Jenny Morasa. 2017. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pada Kabupaten Gorontalo. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing (Goodwill) Vol. 8 No. 2.
- Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasannya fungsi Pengawasan Internal



- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
- Pratiwi, Widya, 2012. Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern. Jurnal Ekonomi STIE Haji Agus Salim. Bukittinggi.
- Primayanti, Any Fitri. 2016. Analisis Persepsi Karyawan Terhadap Peran Auditor Internal (Studi Kasus Pada Hotel Santika Premiere Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanatha Darma.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2011. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi Edisi Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai. 2010. Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Saputri, Wutsqaa Imani. 2018. Peran Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Sardi, Santha Julia, H. Ahmad Rifa'i L, dan Hamdani Husnan. 2016. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Universitas Trunojoyo, volume 12 Nomor 2 hal 158 – 172.
- Sari, Dea Nurfika dan Haryanto, 2016. Analisis determinan efektivitas auditor internal pada inspektorat Provinsi. D.I Yogyakarta. Jurnal Akuntansi & Auditing, Vol. 13, No. 2 : 191-210
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simbolon, Harry Andrian. (2010). Paradigma Baru Audit Internal. Dari: <http://akuntansibisnis.wordpress.com/feed/>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 16.17.
- Sondak, Cindy Felicia. 2017. Persepsi Auditee Terhadap Peran Auditor Internal Pada PT. FABER CASTELL. Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Sugiyono. (2016). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta
<https://www.klikharso.com/2016/08/penilaian-maturitas-spip.html> Di akses pada 21 November 2019, pukul 21.40.
- Suharyanto A. dan Sutaryo. 2016. Pengawasan Internal Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung.
- Sumantri, Mohamad Syarif. 2015. Strategi Pembelajaran: Teori dan Praktik di Tingkat Pendidikan Dasar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. 2010. Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses. Jakarta: Kencana.
- Sutaryo dan Dedi Sinaga. 2018. Government Internal Control System Maturity: The Role of Internal Guidance and External Control of Local Government in Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 19 No. 1, Hlm: 24-3.
- Sutaryo. 2018. Determinan Efektivitas Audit Internal Di Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 13, No. 1.
- Tribunnews. 2016. Dewan nilai inspektorat lemah. <https://aceh.tribunnews.com/201608/20/dewan-nilaiinspektorat-lemah> . Diakses 12 Oktober 2020, 22:25 WIB
- Trisnawati, Nina, Wempy Banga, dan Syamsul Alam, 2018. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Di Kabupaten Konawe. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik, Vol.9, No.2.
- Wati, Lismawati dan Aprilla. 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah. SNA XIII.
- Widanarto. 2012. Pengawas internal, pengawasan eksternal dan kinerja pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara 12 (1): 1–73.
www.bpkp.go.id

